BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 *Australian Agency for International Development* (AusAID)

AusAID (*Australian Agency for International Development*) adalah lembaga Pemerintah Australia bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan nasional Australia. AusAID memberikan saran dan dukungan kepada Menteri dan Sekretaris Parlemen pada kebijakan pembangunan, dan rencana dan mengkoordinasikan kegiatan pengentasan kemiskinan dalam kemitraan dengan negara-negara berkembang.

Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia atau *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program bantuan Australia untuk Indonesia ini bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Di Indonesia, Bantuan AusAID dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dikelola oleh kontraktor yang dipilih secara kompetitif berdasarkan Aturan Pemerintah Persemakmuran untuk penyediaan barang atau jasa. Program ini adalah program antar Pemerintah (*Government to Government*), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID.

Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga Keuangan Internasional (*International Financial Institutions* / IFI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (*International Non-Governmental Organization* / INGO). AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html).

3.1.1 Tujuan AusAID

Tujuan Jangka Panjang program kerjasama pembangunan Australia dengan Indonesia adalah untuk membantu tercapainya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, melalui :

1. Dukungan untuk memperbaiki manajemen ekonomi dengan membantu langkah-langkah utama reformasi struktural

2. Dukungan untuk memperkuat institusi dan pelaksanaan demokrasi dengan membantu reformasi hukum dan keadilan, serta institusi demokrasi
3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas melalui dukungan untuk *counter-terorisme*, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan.
4. Membantu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk merespon berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk jangka menengah dan dalam rangka membantu kepentingan nasional Australia, program bantuan pembangunan akan:

1. Meningkatkan perluasan bantuan dengan mendukung reformasi hukum, ekonomi dan keadilan.
2. Memperbaiki mutu pendidikan, kesehatan dan air bersih (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/index-indo.html).

3.1.2 Proyek – proyek AusAID

Australia memiliki dan menawarkan program kerjasama di berbagai bidang bantuan pembangunan di sejumlah sektor perekonomian Indonesia melalui AusAID. Bidang-bidang tersebut mencakup :

a. Pendidikan dan Beasiswa
b. Kesehatan
c. Perubahan Iklim
d. Pemerintah, Kebijakan dan Koordinasi

e. Gender

f. Pengurangan Resiko Bencana

g. Infrastruktur

h. Prodiktivitas Pedesaan

i. Desentralisasi dan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan penelitian yang diambil maka peneliti lebih memfokuskan kepada bidang pendidikan dan beasiswa. Seperti yang dijelaskan.

3.1.2.1 Pendidikan dan Beasiswa

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Melalui pendidikan, anak perempuan dan laki-laki memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk dapat hidup lebih sehat, menemukan pekerjaan and berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pendidikan adalah hak asasi dasar manusia. Namun masih banyak anak yang kehilangan kesempatan mendapat pendidikan - baik karena mereka tidak mampu bersekolah, tempat tinggal yang jauh atau karena tekanan untuk bekerja pada usia muda belia. Dan apabila mereka anak perempuan atau terlahir cacat, semakin besar lagi kemungkinan mereka tidak bersekolah.

Indonesia berupaya menjamin bahwa pada tahun 2015 setiap anak Indonesia akan mendapatkan sedikitnya pendidikan dasar sembilan tahun - tanpa mempedulikan gender, asal muasal mereka dan berapa penghasilan keluarganya. Sekitar 94 persen anak Indonesia sekarang terdaftar di sekolah dasar enam tahun, yang mana 67 persen mendapat pendidikan penuh sembilan tahun. Tetapi masih

ada sekitar 1 juta anak laki-laki dan perempuan yang setiap tahunnya tidak dapat melanjutkan sekolah di Indonesia.

Kebanyakan anak-anak ini berasal dari keluarga yang pendapatannya US$ 2 (Rp. 20.000,-) atau bahkan kurang per hari. Keluarga-keluarga ini tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya, seringkali tinggal jauh dari sebuah sekolah, dan tidak mampu membayar uang transportasi.

Menjaga semangat anak yang miskin untuk tetap bersekolah juga merupakan sebuah tantangan. Karena kurangnya jumlah sekolah di Indonesia, ruang kelas yang seringkali terlalu penuh dan jumlah buku yang terbatas. Sekolah yang dibangun kurang baik seringkali memiliki fasilitas tidak memadai, seperti tidak adanya kamar kecil yang terpisah untuk anak perempuan dan anak laki laki dan fasilitas untuk anak yang cacat. Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih membuat anak-anak kurang berminat belajar. Selain itu, sekolah-sekolah ini seringkali dikelola oleh kepala sekolah dan pejabat pendidikan yang memiliki kemampuan terbatas dalam hal pengelolaan dan pengaturan anggaran belanja. Akibatnya, setiap tahun masih banyak anak yang terus putus sekolah.

Australia mendukung komitmen Indonesia untuk menyediakan akses untuk pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Bantuan Australia beragam, dari pendidikan dasar hingga pelatihan ketrampilan kejuruan dan meningkatkan kualifikasi tingkat perguruan tinggi.

1. Pembangunan sekolah-sekolah

   Australia telah membangun lebih dari 2.000 sekolah tingkat menengah pertama di berbagai daerah di Indonesia guna membantu meningkatkan

akses pendidikan. Lebih dari 130.000 anak kini telah terdaftar dan belajar di sekolah-sekolah tersebut; 50 persen anak-anak ini adalah perempuan. Karena banyak sekolah yang dibangun di daerah terpencil dan miskin, sekitar 70 persen siswa kini dapat berjalan kurang dari tiga kilometer untuk ke sekolah. Tingkat ketidakhadiran dan putus sekolah di sekolah-sekolah ini juga lebih rendah dibanding tingkat rata-rata nasional.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

   Australia membantu Indonesia meningkatkan sistem pendidikan. Ini termasuk mengembangkan ketrampilan tenaga pendidik dalam mengajar dan kemampuan orang tua untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Australia juga bekerjasama dengan kepala sekolah untuk mengembangkan ketrampilan manajemen mereka beserta pejabat pendidikan di sekitar 34 provinsi untuk lebih baik mengelola dana pendidikan mereka.

3. Peningkatan Madrasah

   Australia juga turut mengembangkan kualitas pendidikan sekolah madrasah di Indonesia. Sekolah berbasis agama merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Diperkirakan 13 persen dari pelajar di Indonesia bersekolah di madrasah. Sekolah-sekolah ini umumnya terletak di daerah miskin dan terpencil. Australia membantu sekolah-sekolah madrasah yang menerapkan kurikulum nasional. Kami membantu melatih tenaga pendidik di sekolah-sekolah ini termasuk mengembangkan keterampilan mereka dalam Bahasa Inggris.

4. Peningkatan Kesetaraan gender

   Bantuan Australia untuk sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk secara adil memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam hal memberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah; menciptakan lingkungan sekolah yang ramah; dan memastikan bahan-bahan pelajaran yang peka jender. Sekolah-sekolah yang dibangun dengan bantuan Australia juga memiliki fasilitas kamar kecil yang terpisah untuk anak laki laki dan perempuan, agar anak perempuan merasa nyaman bersekolah. Australia juga mendukung agar ada perwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan seperti pengajaran, administrasi dan pengelolaan pendidikan

5. Pemberian Beasiswa

   Australia setiap tahunnya memberikan lebih dari 300 beasiswa untuk warga Indonesia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Australia. Ini membantu pembangunan sumber daya Indonesia dan memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua negara. Melalui *The Australia Awards*, beasiswa diberikan pada daerah yang berkembang yang telah disepakati oleh Australia dan Indonesia dan mencakup bidang studi kesehatan, pendidikan, reformasi demokrasi, tata kelola yang baik, penanggulangan dan tanggap bencana dan pengelolaan sektor umum. Diperkirakan 17 persen dari alumni kini menduduki posisi yang berpengaruh, termasuk Wakil Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Penasihat Kebijakan Dalam Negeri Presiden. Sekitar 94 persen

alumni percaya bahwa keahlian yang mereka dapatkan di Australia turut membantu pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

6. Kemitraaan dan Kegiatan Bantuan

   Program-program pendidikan Australia yang terakhir di Aceh, Papua dan Sumatera Barat memiliki perjanjian pembiayaan bersama dengan mitra-mitra kunci pendidikan termasuk Uni Eropa, Kerajaan Belanda, USAID, Bank Dunia dan UNICEF. Belakangan ini, Australia juga memimpin Kelompok Kerja Sektor Pendidikan, sebuah forum yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, yang berfokus pada kebijakan pendidikan(http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/sectors/educationandscholarships-indo.html).

3.2 *Australian Development Scholarships* (ADS)

3.2.1 Latar Belakang Terbentuknya ADS

Beasiswa telah memainkan peran penting dalam program kerjasama pembangunan Australia di Indonesia, dengan sekitar 11.000 beasiswa yang disediakan selama lebih dari 50 tahun. ADS tetap menjadi komponen utama dari program sampai dengan 400 beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2011 ini.

Program ADS dikelola *International Development Program* melalui Kantor IDP di Jakarta untuk memastikan administrasi yang efisien efektif skema ADS di Indonesia.

Setiap tahun, Pemerintah Australia mensponsori orang dari sejumlah negara berkembang untuk belajar di Australia melalui beasiswa *Australian*

Development Scholarships (ADS). Program ADS di Indonesia bertujuan untuk mempromosikan pengembangan sektor sumber daya swasta dan publik manusia di bidang prioritas pembangunan yang disepakati.

Hal ini dicapai dengan memberikan beasiswa paska sarjana bagi warga negara Indonesia untuk belajar di Australia dan bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia untuk memberikan program yang fleksibel untuk kebutuhan manusia di Indonesia guna mencapai sumber daya pembangunan.

Konsisten dengan prinsip-prinsip pendidikan AusAID dan kebijakan pelatihan (Agustus 1996), program ADS diimplementasikan untuk memastikan kualitas (dari personil proyek, rekan dan prosedur), transparansi (seleksi) ; ekuitas dan kelayakan (dalam pemberian beasiswa) ; akses (penerima manfaat untuk dokumentasi dan informasi beasiswa), dan konsistensi (dalam administrasi penghargaan)(http://www.australiaawardsindo.or.id/index.php).

3.2.2 Tujuan ADS

Australian Development Scholarship memiliki 6 Tujuan Utama Program Beasiswa, yaitu :

1. Mengarahkan institusi-institusi negeri dan swasta Indonesia dalam menemukan tujuan institusional dan keperluan pelatihan lewat ketentuan pendidikan pasca sarjana untuk staf yang terseleksi;
2. Mengarahkan perorangan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berperan serta bagi institusi di Indonesia dan profesi dengan ketentuan kesempatan pendidikan pasca sarjana di Australia;

3. Mengarahkan para alumni program ADS untuk menjaga dan memperbaharui keahlian akademis dan profesional mereka;
4. Untuk mempromosikan kerjasama Indonesia dan Australia dalam kebijakan pembangunan;
5. Memberikan pelatihan yang dapat mengimbangi konsep tujuan pengembangan sumber daya manusia yang terdapat didalam aturan AusAID di negara Indonesia; dan
6. Untuk menyeleksi kandidat yang berkualitas tinggi dengan kemampuan menyelesaikan program belajar di Australia dengan waktu perpanjangan yang seminim mungkin dan menyumbangkan ilmu bagi pembangunan negara Indonesia (http://www.australiaawardsindo.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=55&lang=en).

3.2.3 Struktur Pengelolaan ADS

Australian Development Scholarships (ADS) menyediakan kesempatan bagi Indonesia untuk belajar di Australia pada Postgraduate (S2/S3) tingkat. Kandidat harus melakukan studi di salah satu dari empat bidang prioritas pembangunan. Di Indonesia, program Australian Development Beasiswa ini ditawarkan dalam 2 kategori utama: "*Public*" dan "*Open*" dan tersedia juga kategori lainnya yaitu "*Targeted*"

1. Sektor Publik Kategori / ADS *Public*

   Pelamar sektor publik karyawan dari organisasi-organisasi Pemerintah, universitas negeri dan BUMN. Aplikasi mereka harus disetujui oleh pelatihan atau Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) dari badan mereka lokal atau pusat sebelum diajukan ke Kantor Program ADS. Kandidat sektor publik dari instansi pemerintah di luar Jakarta dapat mendaftar langsung ke Kantor Program ADS dengan persetujuan Kakanwil yang relevan atau Kadinas. Aplikasi Sektor publik harus mengidentifikasi secara tertulis pada formulir aplikasi alasan badan untuk menominasikan pemohon dalam hal kebutuhan manusia badan pengembangan sumber daya, manfaat yang diantisipasi dari studi yang diusulkan pemohon ke agen, strategi yang diusulkan untuk memanfaatkan pengetahuan pemohon, keterampilan dan kualifikasi yang didapat dan komitmen untuk mengadopsi strategi dan mendukung pemohon. Calon Pegawai Negeri (CPNS) tidak diperbolehkan untuk mendaftar.

2. Kategori Terbuka / ADS *Open*

   Kategori pelamar Open dari organisasi-organisasi swasta dan universitas dan kategori ini juga terbuka untuk lulusan universitas baru. Tidak ada persetujuan sebelum Pemerintah diperlukan untuk orang-orang menerapkan di Kategori Terbuka, dan aplikasi yang akan diserahkan langsung ke Kantor Program ADS. Mereka membutuhkan, di mana relevan, dukungan dari lembaga universitas, institusi atau swasta di mana pemohon bekerja atau belajar. Aplikasi dikirimkan langsung ke Kantor ADS. Aplikasi harus

mengidentifikasi secara tertulis manfaat antisipasi studi pemohon yang diusulkan untuk badan, bila relevan, dan termasuk, dalam kasus tersebut, strategi yang diusulkan untuk memanfaatkan pengetahuan pemohon, keterampilan dan kualifikasi. Pegawai negeri (Pegawai Negeri) tidak dapat diterapkan dalam kategori Terbuka.

3. Kategori Target / ADS *Targeted*

Sebuah kategori ketiga ada untuk kandidat yang diidentifikasi oleh organisasi mereka dalam konsultasi dengan Program ADS. Calon dalam kategori ini harus diidentifikasi oleh organisasi rumah mereka dan tidak harus berlaku untuk Program ADS independen dari majikan mereka. Calon 'Kategori Target' dipekerjakan oleh organisasi yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (melalui AusAID) sebagai aliansi strategis dengan prioritas Pengembangan Pemerintah Indonesia. Calon dalam kategori ini juga dapat digunakan oleh organisasi pemerintah, perusahaan milik negara, Lemnbaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan kunci negara dan swasta lembaga pendidikan tinggi yang melayani kebutuhan pelatihan organisasi-organisasi ini(http://www.australiaawardsindo.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=56&lang=en).

Beasiswa diselenggarakan penuh untuk program pasca sarjana, dari tingkatan *Master* (S2) sampai tingkatan PhD (S3). Prioritas diberikan kepada bidang studi yang dapat mendukung program pembangunan. Setiap tahun

pemerintah Australia dan Indonesia melakukan peninjauan ulang dan menyesuaikan sasaran utama program.

Prioritas area yang disetujui pada tahun 2008/2009 adalah *Economic Management Democratic Institutions and Practice, Basic Social Services,* dan *Security and Stability*. Perlu di jelaskan bahwa prioritas area yang disetujui bukanlah Bidang Studi, akan tetapi merupakan area penerapan dari bidang studi yang diambil.

Pemerintah Australia dan Indonesia tetap tanggap akan situasi pembangunan yang dibutuhkan. Sebagai contoh pada tahun 1999 dalam menanggulangi krisis ekonomi di Indonesia, 60 jatah beasiswa diprioritaskan pada disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan program reformasi ekonomi di Indonesia seperti bidang keuangan, akunting, ekonomi, hukum dan bisnis.

Perlu diingat bahwa program pelatihan dan keahlian tidak termasuk dalam program beasiswa ADS. Siswa diharapkan menyelesaikan terlebih dahulu program pelatihan mereka di dalam negeri.

Disiplin ilmu yang tertera dibawah bersifat umum dan tidak secara eksklusif. Calon peserta diharuskan mendaftar bidang studi yang telah ditentukan dalam prioritas akademik AusAID.

a. Economic Management

Perbaikan manajemen ekonomi melalui titik-titik kritis dalam percepatan struktur reformasi. Termasuk didalamnya adalah bantuan untuk peningatan pendapatan, restrukturisasi dan pengawasan sektor keuangan, dan manajemen hutang.

b. *Democratic Institutions and Practice*

Perbaikan institusi demokrasi dan prakteknya dengan memberikan bantuan untuk reformasi secara sah dan resmi terhadap institusi hak asasi manusia dan pertanggung jawaban publik, proses pemilihan dalam parlemen dan institusinya, serta masyarakat sipil.

c. *Basic Social Services*

Peningkatan akses dan kualitas jasa sosial dasar melalui perjanjian kebijakan di tingkat nasional dan bantuan perencanaan dan penerapan di tingkat wilayah.

d. *Security and Stability*

Peningkatan keamanan dan kestabilan melalui bantuan dalam pelaksanaan hukum, pencegahan terorisme, konflik dan pencegahan bencana alam dan bantuan kemanusiaan untuk komunitas yang menderita.

Peserta beasiswa harus berhati-hati dalam menentukan pilihan sebelum mendaftar dan mempersiapkan diri untuk mendiskusikan program yang diambil pada saat tes wawancara. Jika beasiswa telah diterima maka tidak memungkinkan untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Peserta yang mengambil program belajar yang berkaitan dengan profesi tertentu harap maklum bahwa dalam program beasiswa ADS tidak termasuk masa program pelatihan untuk kalangan profesional, seperti spesialisasi kedokteran, spesialisasi bidang hukum, dsb (http://adsindonesia.or.id/files/ADSbrochure.pdf).

Jumlah beasiswa ADS yang tersedia setiap tahun ditentukan oleh dana yang disediakan oleh pemerintah Australia dan jumlahnya tiap periode berbeda-beda, contoh untuk tahun ajaran 2008/2009 diharapkan berkisar 270. Jatah beasiswa yang akan dialokasikan sebagai berikut :

A. 2/3 (i.e. 180) beasiswa untuk kategori publik dan 1/3 (i.e. 90) untuk kategori perorangan ;
B. Jumlah beasiswa yang berimbang akan diberikan bagi peserta pria dan wanita;
C. Sebanyak kurang lebih 50% beasiswa *Masters* akan diberikan kepada calon terpilih yang berasal dari lembaga yang terkait dengan proyek AusAID atau yang berkaitan dengan kegiatan AusAID, termasuk universitas-universitas negeri dan lembaga pendidikan penting lainnya didalam daerah sasaran AusAID, termasuk LSM-LSM terkait;
D. Setidaknya 30% (81) beasiswa akan diberikan untuk peserta yang berasal dari Indonesia bagian timur sejalan dengan kebijakan program pemerintah Australia (AusAID) - Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua. Maluku, Maluku Utara dan Aceh
E. 90% (243) beasiswa disediakan untuk program *Masters* (S2) dan 10% (27) untuk PhD (S3);

Lamanya waktu beasiswa yang diperlukan bagi siswa ADS adalah waktu minimal untuk dapat menyelesaikan program beasiswa. Ketentuan ini tergantung dari masing-masing universitas.

Komponen Beasiswa Yang Diberikan adalah :

1) Biaya Perkuliahan - Seluruh biaya akademis dan kepentingan wajib bagi siswa internasional.
2) Biaya Perjalanan - Penerbangan kelas ekonomi ke dan dari Australia pada awal dan akhir masa beasiswa.
3) Biaya perjalanan reuni keluarga - Penerbangan kelas ekonomi ke dan dari Indonesia untuk setiap tahunnya, tidak berlaku bagi siswa yang hanya menjalankan program belajar 1 tahun. (biaya ini hanya berlaku bagi siswa yang tidak membawa serta keluarga).
4) Kerja Lapangan di Luar Negeri - Jika riset lapangan memerlukan paling tidak 50% dari program, penerima beasiswa akan menerima tiket pp (pulang-pergi) ke Indonesia untuk melaksanakan riset lapangan tersebut.
5) Anggaran Pemukiman - Diberikan satu kali pada awal masa belajar di Australia.
6) Tunjangan Hidup - Diberikan selama masa belajar.
7) Tunjangan Kesehatan - Untuk siswa selama masa belajar.
8) Editorial / Bimbingan Belajar - Jika diperlukan, peserta dapat memperoleh bimbingan tutorial untuk mempermudah selama mengikuti program beasiswa.
9) Penyertaan Keluarga - Keluarga (istri/suami dan anak) boleh ikut serta ke Australia atas biaya sendiri jika telah memenuhi persyaratan AusAID dan keimigrasian.

10) Pelatihan Bahasa Inggris - Untuk tujuan akademis, disediakan sebagai bagian dari beasiswa dan wajib (http://adsindonesia.or.id/files/ADSbrochure.pdf).

3.3 Pendidikan Indonesia

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan

peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005-2009 (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 - 2009).

3.3.1 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

a. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
d. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 - 2009).

3.3.2 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

3.3.2.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi sebagai makluk Tuhan (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 – 2009).

3.3.2.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life*

skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 – 2009).

3.3.2.3 Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal,

pendidikan dengan sistem tenaga pendidik kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 – 2009).

3.3.2.4 Pendidikan Tinggi

Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 15% pada tahun 2005 menjadi 18,36% pada tahun 2009. Perkembangan proporsi dosen berkualifikasi S2/S3 secara umum menunjukkan peningkatan, yaitu dari 50% pada tahun 2005 meningkat menjadi 56,30% pada tahun 2009. Sertifikasi dosen baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 proporsi yang bersertifikat mencapai 7,50%. Jumlah perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat 500 terbaik peringkat dunia, perkembangannya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi.

Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2005 ke tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah publikasi internasional sebesar 56%. Statistik tentang paten dan publikasi internasional ini juga menunjukkan bahwa iklim penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi juga meningkat dari 106,10% pada tahun 2005 menjadi 108,10% pada tahun 2009. Capaian indikator kinerja pendidikan tinggi disajikan pada tabel yang ada :

Tabel 3.1 Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2005-2009

No.	Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
1	**APK Pendidikan Tinggi (%)**	15	16.7	17.25	17.75	19.38
2	**Dosen Berkualifikasi S2/S3 (%)**	50.00	54.00	50.60	52.00	58.30
3	**Dosen Bersertifikasi Pendidik (%)**	-	-	-	7.40	7.50
4	**Perguruan Tinggi TOP 500 Dunia (peringkat)**	3	4	5	3	4
5	**Persentase kenaikan Publikasi Internasional (%)**	20.00	21.00	40.00	50.00	58.00
6	**Rasio Kesetaraan Gender (%)**	106.10	99.60	95.30	111.80	109.10
7	**Jumlah yang didapatkan**	4	11	15	43	65

Catatan APK Pendidikan Tinggi dihitung dengan dasar populasi usia 19-24 tahun (sumber : Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 – 2009)

Capaian pembangunan pendidikan secara nasional telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan pembangunan tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan, khususnya untuk lima tahun ke depan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan seperti disparitas capaian antarwilayah, antargender, dan antarpendapatan penduduk. Potensi dan permasalahan pembangunan pendidikan tersebut sebagian besar dijaring dari pemangku kepentingan melalui serangkaian *Focus Group Discussion*. Komposisi keterwakilan pemangku kepentingan tersebut antara lain adalah Kemdiknas, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, rektor, kepala sekolah, dosen, guru, organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi massa/yayasan/lembaga swadaya masyarakat, pengamat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengamat pendidikan

dasar dan menengah, pengamat pendidikan tinggi, budayawan, pengamat teknologi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, media massa, serta industri manufaktur dan industri jasa pemasaran.

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan 2005-2009 Pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tahun 2009 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan nasional pada periode tahun selanjutnya sebagai berikut. Sejumlah permasalahan pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah:

a. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas
b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai.
d. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih terbatas
e. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi masih terbatas
f. Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.

g. Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layananprima pendidikan nasional masih belum mantap (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 - 2009).

3.3.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan Nasional

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan nasional selama periode tahun 2005-2009 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan mendatang sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah;
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal;

7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan;
8. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

   (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 - 2009).

3.3.4 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

(1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
(2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;

(3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana (Dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 - 2009).

3.4 Pendidikan di Papua

Luas wilayah provinsi Papua adalah 420.540 (Km2). Jika dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah Provinsi Papua merupakan 19,33 persen dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 (Km2). Ini merupakan provinsi terluas di Indonesia.

Persentase penduduk Papua jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan tercatat sebesar 0.77% pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1980 meningkat menjadi 0,79%. Tahun 1990 peningkatan persentase jumlah penduduk Papua sangat tinggi yang mencapai 0,91%. Pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 0.86% dan terakhir pada tahun 2005, pesentase jumlah penduduk Papua tercatat sebanyak 0.85%.

Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terluas yaitu 4397 Ha atau 13,87% dari total luas Provinsi Papua. Sedangkan Kota Jayapura merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan kota se-Indonesia, maka Kota Jayapura merupakan kota yang terluas. Kota Wamena (Jayawijaya) dengan ketinggian 2000 - 3000 meter diatas permukaan laut merupakan kota tertinggi dan terdingin di Papua. Sedangkan yang terendah adalah kota Merauke dengan ketinggian 3.5 meter diatas permukaan laut. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Papua menempatkan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui

peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan pada misi pertama (http://www.kab.go.id/wp-content/uploads/2009/11/IPM-Kab-.pdf).

3.4.1 Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Pada peningkatan wilayah perbatasan salah satunya adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel serta Kabupaten Merauke. Jumlah penduduk kabupaten/kota yang menempati wilayah perbatasan pada tahun 2005 adalah sejumlah 651.258 Jiwa. Jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 192.791 jiwa (28%), Kabupaten Keerom sebanyak 49.428 jiwa (8%), Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 55.725 jiwa (9%), Kabupaten Boven Digoel sebanyak 40.629 jiwa (6%) dan Kabupaten Merauke sebanyak 180.928 jiwa (26%). Tingkat pendidikan di kabupaten/kota perbatasan di Provinsi Papua dengan indikator melek huruf Kota Jayapura sebanyak 96,7%, Kabupaten Keerom sebanyak 90,9%, Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 31,4%, Kabupaten Boven Digoel sebanyak 31,4% dan Kabupaten Merauke sebanyak 86,3%. Dengan lama sekolah rata-rata 3,1 tahun (http://suripto3x.com/2010/03/31/pembagian-peran-pemerintah-provinsi-dan-kabupatenkota-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan-sebagai-kunci-membangun-kualitas-sumber-daya-manusia-daerah-perbatasan-suripto-1/).

Data tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Papua. Namun berdasarkan APBD tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua belum

berpihak kepada bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran hanya Rp228.72 miliar, 4,19 persen dari total APBD Papua atau 6,37 % dari dana Otonomi Khusus. UU Pendidikan mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD, seharusnya minimal Rp1,09 triliun dari total dana APBD Papua Rp 5.45 triliun. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dalam pembangunan sektor SDM di Papua. Dimana kecilnya alokasi anggaran pendidikan akan berdampak buruk pada peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Terutama di daerah terpencil yang terisolasi para tenaga pendidik yangmerupakan kunci keberhasilan. untuk di lembaga pendidikan dasar dan menengah hanya berkonsentrasi di wilayah perkotaan (http://pendidikanpapua.com/2009/10/tingginya-buta-aksara-di-papua-gagalnya.html).